

PENCITRAAN KEKERASAN SADDAM HUSSEIN TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PROPAGANDA AMERIKA SERIKAT

*Machya Astuti Dewi **

Abstract

Through internet, the United States has been shaping public opinion by the way of presenting Saddam Hussein as regime who commits a violent against women. This case indicated that gender issue gains more significance in international politics.

Kata-kata kunci: *propaganda; kekerasan terhadap perempuan; media internet, krisis Irak; feminisasi politik; politik internet.*

Pengantar

Krisis Irak yang dimulai 20 Maret 2003 yang lalu telah berakhir, bahkan Saddam Hussein telah tertangkap pada tanggal 13 Desember 2003. Peristiwa ini mungkin menyakitkan bagi sebagian besar umat Islam di seluruh belahan dunia yang sejak awal telah memberikan dukungan pada Saddam dan mengutuk Amerika sebagai agresor. Setelah krisis berakhir kini Irak bergantung pada Amerika dalam melakukan program rekonstruksi atau pemulihan kondisi sosial, politik dan ekonomi pasca jatuhnya rezim Saddam.

Selama krisis Irak berlangsung Amerika tidak saja melakukan serangan bersenjata secara fisik. Dalam era *cyber* Amerika telah menggunakan media internet untuk melakukan perang politik-psikologis dengan Saddam lewat pernyataan-pernyataan yang

* *Machya Astuti Dewi* adalah dosen Fisip, UPN "Veteran", Yogyakarta

memojokkan posisi Saddam Hussein. Lewat situs internet para pejabat pemerintahan Amerika mengemukakan berbagai dalih penyerangan ke Irak sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat internasional bahwa langkah penyerangan ke Irak adalah benar.

Salah satu persoalan yang disorot oleh pemerintah Amerika untuk melemahkan dan memojokkan Saddam Hussein adalah kekerasan rezim Saddam terhadap perempuan. Amerika rupanya berkeinginan memperlihatkan sisi buruk wajah rezim Saddam Hussein dengan menunjukkan bagaimana kaum perempuan telah diperlakukan sangat keji oleh rezim Saddam. Dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dan feminisasi politik internasional tulisan ini akan berupaya untuk mengungkap bagaimana Amerika Serikat lewat media internet berupaya mendapatkan simpati dan memenangkan perang politik-psikologis melawan Saddam Hussein.

Amerika dan Krisis Irak dalam Situs Internet

Penggunaan internet sebagai media propaganda politik saat ini kian menggejala. Internet menjadi media informasi yang dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh semua kalangan masyarakat melintasi batas-batas negara. Karena itulah ada kekhawatiran bahwa penyebaran penggunaan internet untuk akses informasi akan melemahkan kedaulatan negara, karena arus informasi tidak lagi dapat dikontrol oleh negara. Lepas dari kekhawatiran itu fenomena global menunjukkan justru banyak negara memanfaatkan internet sebagai media politik untuk menghancurkan lawan atau mendapatkan dukungan politik dari masyarakat internasional atas kebijakan yang diambil.

Langkah ini juga dilakukan Amerika dalam konfliknya dengan rezim Saddam Hussein di Irak. Lewat situs internet Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan serta Kedutaan Besar Amerika di Islamabad dan Tokyo secara kontinyu membuat pernyataan-pernyataan tentang alasan-alasan pembenaran penyerangan ke Irak dan posisi Amerika yang kuat dalam perang tersebut. Dalam situs <http://usembassy.state.gov/posts/jai/www2003032528.html> yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tokyo pada tanggal 20 Maret 2003 Presiden Bush mengatakan bahwa lebih dari

40 negara telah mendukung koalisi militer Amerika dan sekutunya untuk menyerang Irak melawan Saddam Hussein. Pernyataan itu diperkuat oleh sekretaris urusan pers Gedung Putih, Ari Fleischer bahwa banyak negara telah mendukung Amerika untuk melawan Saddam Hussein. Negara-negara itu antara lain Australia, Bulgaria, Hungaria, Italia, Jepang, Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Spanyol, Inggris dan Turki. Dukungan bagi Amerika meliputi partisipasi militer secara langsung, dukungan logistik, intelijen, dukungan politik, tim ahli senjata kimia dan biologi serta berbagai bantuan kemanusiaan yang lain. Di antara negara-negara yang mendukung Amerika sebagian adalah negara yang baru saja terlepas dari tirani dan penindasan.

Amerika mengatakan bahwa perang di Irak bukanlah perang melawan tentara Irak, melainkan perang untuk melucuti kekuatan rezim Saddam Hussein dengan senjata pemusnah massalnya. Sebagaimana diucapkan oleh Paul Wolfowitz tanggal 23 Maret 2003 bahwa tujuan operasi koalisi militer Amerika adalah untuk mengakhiri rezim yang telah melakukan teror pada rakyatnya dan memiliki senjata teror massa: kimia, biologi serta senjata nuklir dan telah menggunakan terorisme sebagai instrumen kebijakan nasional. Senator McCain menambahkan bahwa Amerika bertujuan untuk membebaskan, bukan menguasai Irak. Tujuan politik Amerika di Irak adalah untuk menciptakan institusi politik yang demokratis. Dalam hal ini para pejabat Irak harus merepresentasikan kedaulatan Irak dan pembangunan demokratisasi itu sendiri memerlukan de-Baath-isasi rezim untuk menghapuskan unsur-unsur tirani.

Amerika juga menjanjikan bantuan kemanusiaan jika keamanan sudah berhasil ditegakkan. Bantuan itu berupa makanan, obat-obatan dan tempat tinggal. Amerika menawarkan program minyak untuk kemanusiaan (*oil for food*), yaitu menjual minyak dalam jumlah terbatas dan kemudian menggunakan hasil penjualan itu untuk tujuan kemanusiaan. Menurut Amerika Saddam Hussein tidak pernah mengalokasikan dana dari hasil penjualan minyak Irak untuk kepentingan suplai makanan bagi rakyatnya.

Masih dalam situs yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Tokyo tanggal 26 Maret 2003 Collin Powell mengatakan perang di Irak dilakukan dengan persetujuan otoritas internasional dan Amerika Serikat akan berupaya meminimalkan korban rakyat sipil.

Perang di Irak dilakukan dengan otoritas resolusi PBB nomor 1441 dan merujuk resolusi sebelumnya, yaitu resolusi nomor 678 dan 687. Karena itu keputusan untuk melakukan perang dengan Irak dilakukan atas dasar otoritas internasional. Menurut Powell resolusi PBB nomor 1441 sangat kuat dan karena disetujui oleh 15 anggota Dewan Keamanan PBB yang menyatakan bahwa Irak sudah mendapat kesempatan terakhir.

Rezim yang Kejam pada Perempuan

Dalam upaya mengajukan dalih pembenaran untuk menyerang Irak lewat media internet Amerika juga mengungkap keburukan rezim Saddam. Sejak tahun 1979 -beberapa saat setelah berkuasa- Saddam Hussein membungkam para oposan politik di Irak. Saddam sering memenjarakan dan mengeksekusi orang tanpa peradilan. Hingga Irak jatuh ke tangan Amerika dan sekutunya pada bulan April 2003 rakyat Irak secara sistematis ditindas, disiksa, diperkosa dan diteror oleh rezim Saddam.

Selama 35 tahun kekuasaan rezim Baath pimpinan Saddam Hussein perempuan Irak adalah kelompok yang turut mengalami penderitaan akibat pembunuhan, perkosaan, penyiksaan dan penculikan. Bahkan perempuan menanggung beban keluarga seorang diri ketika suami, anak laki-laki atau saudara laki-laki mereka diculik atau dibunuh dalam perang. Beban ekonomi menjadi bertambah berat ketika Irak mendapat sanksi embargo ekonomi.

Departemen Luar Negeri Amerika, Gedung Putih dan Kedutaan Besar Amerika di Islamabad memaparkan penderitaan-penderitaan dan kisah sedih kaum perempuan Irak akibat kekejaman Saddam Hussein dalam beberapa situs berikut ini:

Tabel 1
Situs-Situs Internet Pemerintah Amerika Serikat tentang Kekejaman Rezim Saddam Hussein terhadap Perempuan

SUMBER INFORMASI	JUDUL PUBLIKASI	TANGGAL PUBLIKASI	NAMA SITUS
U.S. Departement of State	Iraqi Women Discuss Importance of Their Role during Reconstruction	17 Nopember 2003	http://usinfo.state.gov/dhr/Archive/2003/Nov/18-559678.html
U.S Embassy Islamabad	Text: Iraqi Women Have Earned the Right to Determine Their Future	21 Agustus 2003	http://usembassy.state.gov/islamabad/www03082102.html
Office of the Press Secretary, White House	Past Repression and Atrocities by Saddam Hussein's Regime	4 April 2003	http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/news/20030404-1.html
U.S. Departement of State	Iraqi Women under Saddam's Regime: A Population Silenced	20 Maret 2003	http://www.state.gov/g/wi/rls/18877.htm
Weekly Coloumn Congressman	Voices from Iraq Tell of Saddam's Brutality	17 Maret 2003	http://www.house.gov/apps/list/speech/oh02portman/031703.html
U.S. Department of State	Human Rights and Women in Iraq	6 Maret 2003	http://usembassy.state.gov/posts/jai/www03032528.html
U.S. Departement of State	Iraqi Women Speak Out about Life under Saddam's Dictatorship	9 October 2002	http://usinfo.state.gov/regional/nea/iraq/text/1009irwom.htm
U.S. Departement of State	NGO Report Details Human Rights Abuses by Saddam Hussein: Iraqi Women are among the Regime's Victims	6 Pebruari 2002	http://usinfo.state.gov/topic/pol/terror/02020802.htm

(Sumber: Diolah dari berbagai situs internet)

Melalui situs-situs tersebut pemerintah Amerika mengangkat tema-tema kekejaman Saddam Hussein terhadap perempuan. Dalam

pernyataan di situs internet tanggal 20 Maret 2003 Departemen Luar Negeri Amerika mengemukakan selama hampir 35 tahun memerintah rezim Saddam telah membungkam suara perempuan Irak melalui kekerasan dan intimidasi. Kekejaman rezim Saddam terhadap perempuan dilakukan dalam bentuk:

1. *Pemenggalan kepala*

Dengan dalih memerangi prostitusi organisasi paramiliter pimpinan Uday Hussein (anak Saddam Hussein) telah memenggal lebih dari 200 kepala perempuan dan melemparkan penggalan kepala itu ke depan pintu rumah mereka. Beberapa di antara keluarga itu bahkan dipaksa untuk mempertontonkan penggalan kepala si korban di depan pagar rumahnya. Perilaku barbar itu dilakukan tanpa proses hukum dan banyak di antara korban sebenarnya tidak terlibat dalam prostitusi.

2. *Perkosaan*

Untuk mendapatkan informasi rezim Saddam memperkosa perempuan anggota keluarga sang oposan, mengintimidasi anggota kelompok oposisi dengan mengirim mereka rekaman video yang berisi perkosaan terhadap perempuan anggota keluarga sang oposan tersebut dan mengancam agar mau bekerjasama dengan rezim.

3. *Penyiksaan*

Saddam telah menyiksa dan membunuh perempuan pembangkang yang berseberangan dengan rezim atau perempuan keluarga oposan. Bahkan anak-anak dipenjarakan jika mereka atau orang tua mereka tidak mendukung rezim Saddam. Di penjara para perempuan mengalami banyak penyiksaan: pukulan secara brutal, perkosaan sistematis atau tubuhnya dialiri listrik.

4. *Pembunuhan*

Pada tahun 1990 Saddam Hussein memberlakukan pasal 111 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Irak. Pasal ini membebaskan laki-laki dari hukuman apapun seandainya membunuh anggota keluarga mereka yang perempuan jika pembunuhan itu bertujuan untuk mempertahankan kehormatan

keluarga dari hukuman. Dilaporkan lebih dari 4.000 perempuan telah menjadi korban dari apa yang disebut sebagai "pembunuhan demi kehormatan (*honor killings*)" sejak pasal itu diterapkan.

Departemen Luar Negeri Amerika dalam situs internet pada tanggal 9 Oktober 2002 mengutip beberapa kesaksian dari perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban kekejaman Saddam. Salah satu diantaranya adalah seorang perempuan bernama Sabria Mahdi Naama yang menuturkan pengalamannya selama masa kekuasaan Saddam. Suami Naama, yaitu Abbas Kareem Naama adalah seorang jenderal beraliran syiah. Sesudah Perang Teluk ia ikut dalam perjuangan melawan Saddam Hussein di bagian selatan Irak bersama beberapa perwira militer senior yang lain. Pada akhirnya suami Naama terpaksa melarikan diri dari desanya untuk menyelamatkan diri.

Selama berbulan-bulan Naama khawatir suaminya telah dibunuh oleh rezim Saddam. Namun kemudian muncul perasaan khawatir bahwa jika suaminya masih hidup, diktator Irak akan memerintahkan menahan anak-anaknya sebagai alat untuk memaksa sang jenderal agar keluar dari persembunyian. Akhirnya Naama sendiri terpaksa melarikan diri dengan anak-anaknya. Naama mengatakan bahkan ia tak mampu bertahan satu hari lagi pun di Irak karena keselamatan mereka terancam.

Nama mengisahkan perjuangan berat mereka ketika meninggalkan Irak, bahkan anak-anaknya hampir mati di kamp Raha di daerah gurun Saudi Arabia. Jenderal Naama akhirnya dapat melarikan diri dan bertemu di kamp yang sama. Keluarga itu bersatu kembali dan kemudian pindah ke San Diego Amerika bergabung dengan para pengungsi yang lain.

Perempuan lain, Safia Al Souhail yang ayahnya dibunuh oleh rezim Saddam pada tahun 1994 mengisahkan kekejaman rezim Saddam Hussein:

"Iraq under Saddam's regime has become a land of hopelessness, sadness and fear. A country where people are ethnically cleansed... rape is systematic... congenital malformation, birth defects, infertility, cancer and various disorders are the results of Saddam's gassing of his own people... the killing and torturing of husbands

in front of their wives and children occurs ... Iraq under Saddam has become a hell and a museum of crimes”.

Sementara itu Nidal Shaikh Shallal yang bersama suaminya diusir dari Irak mengatakan banyak perempuan Irak harus kehilangan orang-orang yang dicintai: suami, saudara laki-laki dan ayahnya. Perempuan Irak telah menderita karena penyiksaan, pembunuhan, pemenjaraan, eksekusi dan pengusiran. Banyak perempuan, terutama perempuan yang berseberangan dengan rezim telah diperkosa oleh rezim Saddam Hussein dan isteri dari pembangkang politik dibunuh atau disiksa di depan suami mereka untuk memaksa agar sang pembangkang mengaku. Kadangkala perempuan diculik ketika mereka sedang berada di jalan oleh kelompok *gang* Uday dan Qusay (anak-anak Saddam) dan kemudian diperkosa.

Masih dalam rangka mendengarkan kesaksian para perempuan Irak korban kekejaman rezim Saddam Hussein, pada tanggal 6 Maret 2003 Departemen Luar Negeri Amerika mensponsori suatu acara diskusi tentang hak-hak asasi manusia di Irak. Dalam pertemuan itu Amerika mengundang para aktivis perempuan Irak yang pernah mengalami kekejaman rezim Saddam. Sebagaimana dikutip dalam situs internet Departemen Luar Negeri Amerika, Tanya Gilly (seorang aktivis perempuan Irak) menyatakan bahwa pada masa Saddam Hussein rakyat Irak hidup dalam ketakutan. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berbicara dan beragama. Bahkan penyiksaan, pembunuhan dan pembersihan etnis digunakan oleh rezim Saddam untuk mempertahankan kekuasaan. Gilly mengemukakan hanya Amerika dan sekutunya yang dapat membantu Irak membebaskan diri dari rezim Saddam. Jika tidak, di masa mendatang akan semakin banyak perempuan Irak yang jika Saddam tidak dihentikan. Kaum perempuan Irak yang tinggal di Amerika dan sekutunya dapat menjadikan Irak sebagai negara yang didasarkan pada hukum dan keadilan bagi warga negaranya, yaitu bahwa hak-hak mereka diakui dan

4. An
an

For
da
men
ment
pembu
Saddam's
husbands

419

na, aktivis perempuan yang lain ketika masuk ke penjara-penjara untuk Saddam. Penjara-penjara itu tidak saja penuh

dengan laki-laki dan perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Mereka yang dipenjara bukan saja orang-orang Irak, tetapi juga dari berbagai negara Timur Tengah dan Eropa. Para tahanan itu mengajak Naama untuk berkeliling melihat ruang-ruang penyiksaan. Di situ Naama melihat alat semacam gergaji untuk menyiksa manusia, kolam berisi cairan kimia untuk mencelup manusia di dalamnya dan ada pula ruang khusus untuk melakukan kekerasan seksual atau perkosaan. Sebagian besar perempuan tahanan itu masuk ke penjara pada umur 14 atau 15 tahun. Ketika keluar dari penjara beberapa tahun kemudian mereka membawa 3, 4 hingga 5 anak akibat perkosaan yang mereka alami hampir setiap hari.

Perempuan Irak Pasca Krisis: Ketergantungan pada Amerika

Ketika menyiarkan kisah-kisah penderitaan perempuan Irak akibat kekejaman rezim Saddam Hussein lewat media internet Amerika sebenarnya sudah “menang” dalam menyerang Saddam, jauh sebelum Baghdad jatuh dan Saddam berhasil ditemukan. Kemenangan kembali diraih Amerika ketika isu kesetaraan gender diangkat oleh kelompok aktivis perempuan Irak pasca krisis Irak. Lewat media internet organisasi-organisasi perempuan internasional mengekspos keinginan dan harapan agar Amerika membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di negara Irak yang demokratis.

Dalam *Washington Post* (30 Nopember 2003) dua aktivis perempuan Irak: Hind Makiya dan Sawsan El Barak mengemukakan kegembiraan mereka atas keberhasilan Amerika dan sekutunya mengalahkan rezim Saddam Hussein:

“We had great expectations, and we were filled with deep appreciation when the troops of the United States and its coalition of allies rid Iraq of a tyrannical dictator. We understand the deep suffering of families as sons and daughters give their lives in the military intervention. We recognize the investment -and sacrifice- the United States is making to free us to build a new democratic Iraq. But the democracy will fail if women are not involved”.

Hind Makiya dan Sawsan El Barak mengakui bahwa perempuan Irak telah sukses mengenyam pendidikan tinggi dan berkarir. Banyak perempuan Irak yang berhasil menjadi insinyur, dokter, ahli hukum

dan guru. Namun demikian menurut Makiya dan El Barak semasa Saddam berkuasa suara mereka sebagai perempuan tetap tidak didengar, bahkan sering diabaikan.

Setelah rezim Saddam kalah mereka sangat berharap pada Amerika untuk menjamin perempuan Irak dapat berperan dalam menjaga masa depan Irak yang demokratis. Aktivis perempuan Irak memerlukan dana dari Amerika untuk melakukan pengorganisasian dan lobi-lobi serta untuk melatih para pemimpin perempuan dan membentuk jaringan dengan organisasi-organisasi sosial internasional. Kedua perempuan itu kembali menyatakan bahwa rakyat Irak sangat berhutang budi pada pemerintah dan bangsa Amerika yang telah membebaskan mereka dari kediktatoran.

Pada bulan Oktober 2003 kaum perempuan Irak mengadakan konperensi di timur laut Sulaymaniyah. Dalam pertemuan itu hadir 250 perempuan, baik dari kelompok Sunni maupun Syiah yang bersepakat untuk membangun negara Irak yang lebih demokratis. Pertemuan itu merupakan bagian dari gerakan internasional "Women Waging Peace" yang mengadakan pertemuan tahunannya yang kelima dengan para pembuat kebijakan Amerika di Cambridge Nopember 2003. Organisasi yang menghimpun kelompok-kelompok perempuan dari Afghanistan, Columbia, Sierra Leone, Liberia, Sudan, Israel dan Palestina ini memiliki tujuan menentang kekerasan terhadap perempuan.

Dalam konperensi itu seorang aktivis perempuan: Ala Talabani ketika diwawancarai *Boston Globe* (9 Nopember 2003) mengatakan bahwa mereka sedang mencoba membangun kerjasama antar perempuan. Bersama-sama teman-temannya Talabani bekerja dalam organisasi akar rumput. Mereka menyerukan agar perempuan dilibatkan dalam perumusan konstitusi baru dan agar konstitusi itu menjamin hak-hak perempuan yang merupakan 55 persen jumlah penduduk Irak. Namun mereka juga khawatir bahwa jangka waktu penyusunan konstitusi baru yang amat pendek, yaitu 6 bulan akan dapat menghapuskan elemen-elemen religius yang konservatif. Makiya, seorang aktivis perempuan yang lain mengemukakan kekhawatiran serupa: "There's sense of panic about the road map. Conditions and times and deadline might adversely influence the result. People need to feel free to participate".

Feminisasi Politik Internasional?

Melalui pernyataan-pernyataan dan kesaksian-kesaksian tentang kejahatan rezim Saddam Hussein terhadap perempuan dalam media internet, Amerika Serikat telah mengkonstruksikan Saddam Hussein sebagai sosok biadab yang telah menggunakan perempuan sebagai alat politik untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Akibat kebiadaban Saddam, banyak perempuan Irak telah menderita karena diperkosa, diteror, kehilangan suami dan anak-anaknya, atau bahkan dibunuh. Media internet telah digunakan Amerika sebagai media untuk menjatuhkan Saddam Hussein. Penayangan kesaksian kaum perempuan Irak yang telah mengalami atau menyaksikan kekejaman rezim Saddam dalam berbagai situs internet memojokkan posisi Saddam.

Ketika tema-tema kekerasan terhadap perempuan oleh rezim Saddam Hussein diangkat oleh pemerintah Amerika dalam situs-situs di internet secara politik-psikologis Saddam sudah kalah dari Amerika. Bukan saja karena Amerika mampu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Saddam adalah diktator yang sangat kejam, namun juga karena wacana kekerasan terhadap perempuan beberapa tahun terakhir ini sedang mengemuka di berbagai negara. Kalangan aktivis perempuan yang sedang giat berjuang melawan praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan pasti akan sangat membenci Saddam Hussein.

Tidak bisa diingkari kini persoalan-persoalan perempuan menjadi isu menarik dalam studi hubungan internasional, terutama dalam masa peperangan. *The National Organization for Women* pernah melaporkan bahwa 80-90% korban konflik-konflik bersenjata sejak Perang Dunia II adalah orang-orang sipil, terutama perempuan dan anak-anak. Dalam situasi perang perempuan rentan menghadapi perkosaan -suatu isu yang baru belakangan ini ramai dibicarakan. Sebelumnya data tentang perang biasanya difokuskan pada jumlah orang yang mati dalam pertempuran. Padahal, perempuan adalah pihak yang paling menderita dalam masa peperangan. Bahkan ketika perang telah usai perempuan juga harus berhadapan dengan serangkaian kesulitan ekonomi (Tickner, 1996: 454).

Isu kekerasan terhadap perempuan yang diusung oleh pemerintah dan media massa Amerika dalam media internet

menunjukkan bahwa kehidupan perempuan yang dalam tradisi klasik ilmu hubungan internasional diletakkan di tempat terendah dan dianggap tidak penting ternyata telah digunakan oleh Amerika sebagai "senjata" untuk memojokkan Saddam Hussein. Dari fenomena ini bisa diambil pelajaran bahwa persoalan perempuan yang seringkali diremehkan dalam studi hubungan internasional justru berperan penting dalam konflik Irak-Amerika, karena telah digunakan oleh Amerika sebagai "senjata" untuk memojokkan Saddam Hussein. Di sinilah menurut Jones (1996) persoalan-persoalan perempuan yang sering dilihat bersifat pribadi itu sebenarnya bersifat politik dan internasional. Seiring dengan pemahaman itu semestinya makna "the political" juga berubah setelah melihat pengalaman-pengalaman perempuan.

Penutup

Pasca krisis Irak mungkin Amerika sangat lega karena telah berhasil memenangkan peperangan dengan Saddam Hussein, baik perang secara fisik dengan menggunakan senjata maupun perang politik-psikologis dan perang simbolik melalui pernyataan-pernyataan di media internet. Amerika juga boleh bangga mengingat kaum perempuan Irak berterimakasih kepada Amerika karena telah mengalahkan rezim Saddam yang kejam terhadap perempuan. Terlebih lagi pasca krisis kaum perempuan Irak mengemukakan harapan agar Amerika membantu mereka dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum mereka nikmati selama masa pemerintahan Saddam Hussein.

Bagaimana dengan kaum perempuan Irak? Apakah mereka masih optimis bahwa Irak pasca Saddam akan lebih demokratis dan menghormati hak-hak perempuan? Kiranya persoalan itu masih menjadi tanda tanya besar, karena ketika *Coalition Provisional Authority* mengumumkan pembentukan *Governing Council* di Irak pasca jatuhnya Saddam ternyata hanya ada tiga perempuan di dalamnya. Bahkan semenjak salah satu diantara tiga perempuan itu, yaitu Dr. Akila al-Hashimi terbunuh tinggal dua perempuan dalam dewan itu. Frustrasi bertambah berat ketika dewan mengumumkan pembentukan komite untuk menyusun konstitusi baru, ternyata semua perumusny adalah laki-laki. Sementara itu dalam deputi pos kabinet juga hanya

ada lima perempuan. Jalan panjang masih harus diperjuangkan oleh perempuan Irak agar tidak lagi mengalami nasib yang sama seperti pada masa kekuasaan Saddam Hussein. ***

Daftar Pustaka

- Jones, Adam, (1996). Does 'Gender' Make the World Go Round?: Feminist Critics of International Relations. *Review of International Studies*, Vol. 22, No 4.
- Tickner, Ann J., (1996). 'International Relations: Post-Positivist and Feminist Perspectives'. Dalam Robert E. Goodin dan Hans-Dieter Klingemann (eds). *A New Handbook of Political Science*. New York: St. Martin's Press, Inc.
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (2003). *Iraqi Women Under Saddam's Regime: A Population Silenced*, didownload dari <http://www.state.gov/g/wi/rls/18877.htm>
- (2003). *Women in Iraq*, didownload dari <http://www.state.gov/g/wi/c8973.htm>
- (2003). *Human Rights and Women in Iraq*, didownload dari <http://usembassy.state.gov/posts/jai/wwwwh2003032528.html>
- (2002). *NGO Report Details Human Rights Abuses by Saddam Hussein: Iraqi Women are among the Regime's Victims*, didownload dari <http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/02020802.htm>
- (2002). *Iraqi Women Speak Out about Life under Saddam's Dictatorship*, didownload dari <http://usinfo.state.gov/regional/nea/iraq/text/1009irwom.htm>
- Kedutaan Besar Amerika Serikat di Islamabad (2003). *Iraqi Women have Earned the Right to Determine Their Future*, didownload dari <http://usembassy.state.gov/islamabad/wwwwh03082102.html>

Kedutaan Besar Amerika di Tokyo (2003). *Bush: More than 40 Nations Support Actions to Disarm Iraq*, didownload dari

<http://usembassy.state.gov/posts/jai/wwwwh2003032528.html>

_____ (2003). *Defense Department's Wolfowitz Urges Iraqi Regime to Surrender*, didownload dari

<http://usembassy.state.gov/posts/jai/wwwwh2003032528.html>

_____ (2003). *Powell says Iraq War Conducted with International Authority*,

didownload dari

<http://usembassy.state.gov/posts/jai/wwwwh2003032528.html>

_____ (2003). *Senator McCain: U.S. Seeks to Liberate, Not Subjugate Iraq*, didownload dari

<http://usembassy.state.gov/posts/jai/wwwwh2003032528.html>

Portman, Rob (2003). *Voices from Iraq Tell of Saddam's Brutality*, didownload dari http://www.house.gov/apps/list/speech/oh02_portman/031703.html

Sekretariat Gedung Putih (2003). *Past Repression and Atrocities by Saddam Hussein's Regime*, didownload dari <http://www.whitehouse.gov/infocus/iraq/news/20030404-1.html>

Surat Kabar

Boston Globe, 9 Nopember 2003.

Washington Post, 30 Nopember 2003.S

Indeks Artikel Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 7, Juli 2003 - Maret 2004

Abrar, Ana Nadhya, *'Tantangan dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dalam Pers di Indonesia.'* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 377 - 392.

Darwin, Muhajir, *Gerakan Perempuan di Indonesia dari Masa ke Masa*, Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 283 - 294.

Dewi, Machya A., *Pencitraan Kekerasan Saddam Hussein Terhadap Perempuan Sebagai Propoganda Amerika Serikat* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 413 - 426.

Effendi, Tadjuddin Noer, *Globalisasi dan Kemiskinan*, Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 141 - 160.

Hanafi, Ahmad, *Liberalisasi di Inggris 1970-1990.*, Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 113-139.

Hiariej, Eric, *Teori Negara Marxis* Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 261 - 282.

Kurnia, Novi dan Putra, I Gusti Ngurah, *Perempuan dalam Dunia Public Relations* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 293 - 412.

Musyaddad, A., *'Kapitalisme Indonesia: Langkah-langkah tanpa Peta,'* Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 35-62.

Narendra, Pitra, *'Media Massa: Dalam Jerat Jaring Neoliberalisme,'* Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 63-88.

Partini, *Potret Keterlibatan Perempuan dalam Pelayanan Publik di Era Otonomi Daerah* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 315 - 334.

- Ratnawati, *Potret Kouta Perempuan di Parlemen* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 295 - 314.
- Setyaningrum, Arie, *Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial* Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 243 - 260.
- Siregar, Ashadi, *Etika Jurnalisme Televisi di Tengah Disorientasi Negara dan Pasar* Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 227 - 242.
- Siregar, Ashadi, *Ketidakadilan Konstruksi Perempuan di Film dan Televisi* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 335 - 350.
- Suharko, *NGO, Civil Society dan Demokrasi: Kritik Atas Pandangan Liberal* Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 205 - 226.
- Swastika, Alia, *'Komodifikasi Perempuan: Tapak Ekonomi Neo-Liberal'* Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 89-112.
- Syeirazi, M. Kholid, *'Dilema Praksis Globalisme Neo-Liberal,'* Volume 7, No 1, Maret 2003, halaman 1-34.
- Wahyudi, Agus, *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan Global: Prioritas Keadilan dan Pentingnya Integrasi Ilmu Pengetahuan* Volume 7, No 2, Nopember 2003.
- Winanti, Poppy, *Developmental State dan Tantangan Globalisasi: Studi Kasus Korea Selatan* Volume 7, No 2, Nopember 2003, halaman 175 - 204.
- Yusuf, Iwan A. *Peningkatan Kepekaan Gender dalam Jurnalisme* Volume 7, No 3, Maret 2004, halaman 351 376.